

SEKOLAH DAN MASYARAKAT BERBASIS MULTIKULTURAL

Abstract

Oleh:
Tri Wahyudi Ramdhan
Email:
wahyudi@darul-hikmah.com

Sekolah Tinggi Agama Islam
Darul Hikmah Bangkalan

This study is a Library Research written based on the results of studies of various library materials, both in the form of books, journals, articles and so on related to schools and communities that are collided with multicultural terms. In line with the method, the data collection techniques used in this study are documentary techniques, in the sense that data is collected through documents as referred to as library material. The data collected in this study is then analyzed using content analysis. The results of the discussion are that multicultural-based schools and communities are formal educational institutions and community environments that uphold and recognize the existence of plurality of identities in the community and willing to accept all forms of diversity

Keywords: *Schools, Communities and Multicultural*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia, kebenaran pernyataan ini dapat dilihat dari sosiokultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas di negeri ini. Dari segi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Banyaknya kelompok masyarakat tersebut berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam, sehingga Indonesia dikenal dengan negara yang multikultural.

Sebagai negara yang multikultur, Indonesia dituntut mampu mengelola keragaman atau pluralistik itu secara baik dalam rangka mempuku NKRI dan memperkokoh serta memperkuat semangat kebangsaan dalam bingkai "Bhineka Tinggal Ika". Hal tersebut dimaksudkan untuk menjunjung tinggi perasatuan dan kesatuan bangsa agar tidak berdampak pada timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat, seperti konflik antar etnis, antar pemeluk agama, suku, ras, kesenjangan perekonomian, kesenjangan antara mayoritas, minoritas, pribumi maupun nonpribumi serta berbagai konflik sosial lainnya yang dapat

memecah belah persatuan bangsa.

Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan pendidikan yang berbasis multikultural sangat relevan diterapkan di Indonesia. Dan untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan baik formal, nonformal, atau informal (keluarga dan masyarakat). Dalam kajian akan dikaji mengenai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan multikultural, khususnya tentang konsepsi kurikulum berbasis multikultural di sekolah dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kultur (kebudayaan). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Kata "multicultural" menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berasal dari dua akar kata yaitu "multi" berarti lebih dari satu, banyak, berlipat ganda,¹ dan "kultur" berarti kebudayaan, cara pembudidayaan, cara pemeliharaan.² Lebih

¹ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sinar Terang, 2009), 487.

² Susilo Riwayadi dan Suci nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 413.

lanjut, menurut Machfud, secara hakiki, dalam kata *multiculturalisme* terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.³

Secara implisit istilah “*multikultural*” itu sendiri adalah konsep kultur yang merujuk pada kesamaan bahasa, sejarah, keyakinan agama, asal wilayah geografis, ras, kebangsaan, dan etnis.⁴ Sementara itu, Komarudin Hidayat menyatakan bahwa istilah multikultural tidak hanya merujuk pada kenyataan sosial antropologis adanya pluralitas kelompok etnis, bahasa, dan agama yang berkembang di Indonesia tetapi juga mengasumsikan sebuah sikap demokratis dan egaliter untuk bisa menerima keragaman budaya.⁵

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa multikulturalisme adalah pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang luas, baik mencakup keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (*subkultur*) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Karim, gagasan multikulturalisme menekankan bahwa keragaman sosial merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, membangun semangat multikulturalisme berarti membangun kesetaraan dalam keragaman (*equality in difference*). Hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural merupakan suatu hal yang substansial. Agar hubungan timbal balik dapat berlangsung secara harmonis diperlukan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.⁶

Multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda, tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris (*symmetrical differentiated citizenship*), yakni dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan

terhadap pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan/atau isu-isu sektarian yang bisa mengancam harmoni dalam kehidupan bersama.⁷ Sebagaimana yang dikutip dari Fay, Jary & Jary, Watson, dan Reed, Parsudi Suparlan menguraikan bahwa multikulturalisme merupakan acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural.⁸

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Dalam hal ini, masyarakat memunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mosaik. Mosaik kebudayaan tersebut mencakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil untuk kemudian mewujudkan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latarbelakang kebudayaan. Scott Lash dan kawan-kawan menjelaskan bahwa multikulturalisme berarti keberagaman budaya.⁹

Terdapat tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang beragam, baik secara agama, ras, bahasa, dan budaya, yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multikultural*). Meskipun ketiganya sama-sama mengacu pada ketidaktunggalan, tetapi pada dasarnya masing-masing tidak merepresentasikan hal yang sama. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda/heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan. Sementara, multikulturalisme lebih menekankan pada kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.

³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 75.

⁴ C.W. Watson, *Multiculturalism Concepts in the Social Studies* (Open University Press, 2000), 1.

⁵ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 70.

⁶ Abdul Gafar Karim, *Multikulturalisme* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2010).

⁷ Syamsuddin Haris, *Paradigma Baru Otonomi Daerah* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001)

⁸ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

⁹ Lihat: Scott Lash dan Mike Featherstone (ed), *Recognition And Difference: Politics, Identity Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), 2-6.

Apabila pluralitas sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik. Dalam hal ini, Bikhu Parekh mengategorikan konsep multikulturalisme ke dalam tiga bagian pokok yaitu:

1. Perbedaan *subkultur* (*subculturediversity*), yaitu individu atau sekompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku.
2. Perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap mainstream nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya.
3. Perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang genuine sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).¹⁰

Pendidikan dan Multikulturalisme

James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama pendidikan multikultural yaitu untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah, baik siswa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berkebutuhan khusus atau normal, yang berbeda ras, etnis, dan kultur atau yang sama. Tujuan mulia ini juga tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, hanya saja pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah di lokalnya masing-masing.¹²

¹⁰ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 3-4.

¹¹ Faridah Hanum, *Pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa*, 4.

¹² Abdullah Aly *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam*

Di samping itu, pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹³

Bahkan lebih dari itu, perbedaan juga muncul akibat perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter, perbedaan kemampuan dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Pendidikan multikultural menanamkan sejumlah nilai kepada peserta didik agar mereka mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam realitas yang berbeda-beda tersebut, sehingga mereka dapat mengelola keberagaman menjadi kekuatan untuk mencapai kemajuan Indonesia, tanpa mengaburkan dan menghapuskan nilai-nilai agama, identitas diri dan budaya.¹⁴

Tawaran tentang pentingnya pendidikan multikultural yang diwacanakan para pakar pendidikan di Indonesia ini dalam batas tertentu mendapat tanggapan yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".¹⁵

Asumsi-asumsi di atas semakin memperkuat sebuah persepsi bahwa pendidikan multikultural mutlak diperlukan untuk membangun karakter suatu bangsa. Melalui pendidikan multikultural

Surakarta (Yogyakarta: Pusstaka Pelajar, 2011), 6-7.

¹³ Ngainun Naim dan Achmad Saiqi, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 50.

¹⁴ Tim Kemenag RI, *Panduan integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Kirana Cakra Buana, 2012), xi. Bandingkan dengan: Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, 2016), 51.

¹⁵ Suardi, "Pendidikan Multikultural: Sebuah Dekonstruksi Pendidikan di Tengah Kemajemukan," *Wahana Didaktika* (2016): 19.

sikap saling menghargai saling pengertian dan saling percaya terhadap perbedaan akan terbangun dan berkembang dengan baik. Pendidikan multikultural bisa dikatakan sangat mendesak sebagai sarana yang paling strategis untuk mengasah menanamkan kesadaran dan mengembangkan warga negara yang memiliki kesadaran hidup demokratis dan partisipasi aktif menuju masyarakat madani Indonesia.¹⁶

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan partisipasi semua pihak, terutama masyarakat beragama karena banyak perpecahan diatasnamakan agama. Segenap umat beragama diharapkan mengambil bagian aktif dalam upaya menggapai idealisme luhur ini. Pola pemahaman agama yang kontekstual dan pendekatan dialogis-inklusif perlu dikembangkan dalam membina hubungan antaragama dan hubungan lintas budaya di tanah air ini.

Dengan cara seperti ini, empat pilar kehidupan bernegara akan terus eksis, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang menjadi landasan ideal bangsa Indonesia. UUD 1945 adalah landasarn konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. NKRI adalah pemersatu bangsa dan Bhineka Tunggal Ika adalah perekat persatuan dalam untaian kemajemukan.¹⁷

Sekolah Multikultural

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, maka perwujudan pendidikan multikultural di lembaga formal dapat disebut dengan sekolah multikultural. Sekolah formal mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang menjalankan dan mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme merupakan sekolah/kampus multikultural. Salah satu kampus yang mendeklarasikan dirinya sebagai kampus multikultural

adalah Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam pandangan Banks, terdapat lima dimensi yang terkait dengan pendidikan multikultural di sekolah, yaitu:¹⁸

1. *Content Integration* (integrasi materi pendidikan dalam kurikulum). Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam matapelajaran/disiplin ilmu. Berbagai budaya tersebut terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, guru memperkaya contoh, data, dan informasi lain dari berbagai budaya. Guru tidak hanya mencukupkan contoh dan informasi yang ada di dalam buku teks.
2. *The Knowledge Construction Process* (kontruksi ilmu pengetahuan). Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi ia harus mampu membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan tersebut diciptakan. Dalam proses terbentuknya ilmu pengetahuan ini, guru juga harus mampu menjelaskan pengaruh ras, etnis, serta kelas sosial individu dan kelompok dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut.
3. *An Equity Paedagogy* (kesamaan, keadilan, atau kesetaraan dalam pendidikan). Perbedaan murid dari aspek ras, suku, agama, dan sebagainya harus terakomodir di dalam pembelajaran. Di dalam kelas multikultural tidak boleh terdapat diskriminasi terhadap siswa yang beda kultur. Penggunaan teknik pembelajaran harus mempermudah mereka dari kelompok etnis dan kelas sosial yang berbeda-beda. Termasuk perilaku multikultural di dalam pembelajaran adalah penyesuaian metode pembelajaran dengan cara belajar murid, dan penyesuaian gaya mengajar dengan variasi gaya belajar murid yang berbeda kultur. Hal ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik mereka yang beragam mulai dari ras, budaya maupun sosial.
4. *Prejudice Reduction* (pengurangan prasangka). Pengurangan prasangka merupakan sasaran penting pendidikan multikultural. Pengurangan prasangka meliputi pengembangan hubungan positif di kalangan murid dari latar belakang etnis

¹⁶ Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 66.

¹⁷ Marzukie Ali, *Pemahaman Multikulturalisme untuk Kentuban Negara Kesatuan Republik Indonesia*, makalah dalam Dialog Kebangsaan Universitas Negeri Surabaya 23 Desember 2010, 4.

¹⁸ James A Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimention, and Practice*, 3-4.

yang berbeda, maupun pengembangan sikap yang lebih demokratis dan toleransi terhadap orang lain.

5. *Empowering School Culture* (penguatan budaya sekolah). Penguatan budaya sekolah dapat dilakukan dengan melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama, dan berinteraksi positif dengan seluruh warga sekolah tanpa melihat latar belakang etnis, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan dimensi tersebut, maka sekolah yang berbasis multikultural adalah sekolah yang menjunjung tinggi realitas keragaman kultur, serta berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran multikultural kepada peserta didik yang memiliki pemahaman keberagaman yang lebih humanis dan pluralis melalui kegiatan pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya di sekolah, pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan prinsip *fleksibilitas*, tidak harus mengubah kurikulum, melainkan dapat diintegrasikan kedalam matapelajaran atau pun melalui kegiatan pembiasaan budaya akademik di sekolah. Amat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk matapelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural penting dilakukan di sekolah dan masyarakat karena ia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas dan keragaman yang mampu mengatasi gejolak yang terjadi di masyarakat.²⁰

Sementara Komarudin Hidayat mengajukan prinsip yang harus dipahami guru dalam kelas multikultural, yaitu:

1. Setiap anak adalah istimewa. Guru harus memandang setiap peserta didik adalah unik, istimewa, dan terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Anak harus dipahami, diterima apa adanya, dicintai, dan difasilitasi agar masing-

masing tumbuh secara optimal sesuai bakat dan minatnya.

2. Pendekatan *multi-intelligences*. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang mendukung *multi-intelligences* peserta didik. Setiap peserta didik hendaknya dipahami secara individual mengingat masing-masing individu memiliki kekuatan dan kelemahan inteligensia yang berbeda.
3. Pembelajaran aktif. Peserta didik merupakan subjek dalam pembelajaran, maka apa pun yang dilakukan guru hendaknya merupakan upaya menumbuhkan potensi mereka. Oleh karena itu, peserta didik dikondisikan untuk aktif dan bebas dalam mengemukakan pelbagai pikiran dan imajinasinya. Sebagai fasilitator dan pendidik, guru senantiasa memberikan rambu-rambu. Motivasi dan koreksi dari guru dilakukan dengan semangat edukasi dan apresiasi.
4. Universalitas agama. Keragaman agama yang ada hendaknya didekati dengan dua cara, yakni: *Pertama*, agama diposisikan sebagai fenomena sosial dan budaya yang perlu diketahui murid. *Kedua*, murid diperkenalkan nilai-nilai universalitas agama terlebih dahulu, bahwa semua agama pasti memiliki kesamaan dalam ajaran moral. Di balik keragaman tradisi dan simbol-simbol yang khas, semua agama mengajarkan pemeluknya untuk cinta damai, menolong sesama, dan membenci semua kejahatan.
5. Semangat kemanusiaan dan keindonesiaan. Untuk menjaga identitas diri tanpa harus bersikap eksklusif. Sejak dini, peserta didik hendaknya diperkenankan dan dibiasakan memahami dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan serta cinta bangsa.²¹

Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang kompleks. Kompleksitas itu membawa banyak konsekuensi, baik berupa peluang maupun tantangan, dalam pembangunan. Masyarakat sendiri dapat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinue, dan yang terikat

¹⁹ Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, *PKN dan Masyarakat Multikultural* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), 31-32.

²⁰ Muhamad Abdul Manan, "Gagasan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Bernuansa Multikultural," *Edupedia* (2017): 20-33.

²¹ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 74-75.

oleh suatu rasa identitas bersama.²² Oleh karena itu, kajian terhadap masyarakat multikultural menjadi penting, terutama bagi bangsa Indonesia yang tengah bersemangat untuk menggerakkan potensi pembangunan.

Secara teoritis, Watson memaknai masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang di dalamnya berkembang banyak kebudayaan.²³ Sementara Suryadinata mengartikan masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai.²⁴ Dalam masyarakat multikultural konflik budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Salah satu solusinya yaitu tawaran konsep Integrasi Multikultural untuk meredakan konflik tersebut. Dengan masyarakat yang multikultural, masing-masing budaya dari etnis yang berbeda saling hidup berdampingan, saling menghargai, dan mempelajari satu sama lain.

Dalam hal ini, Parekh (1997) membedakan lima model multikulturalisme di masyarakat, yaitu:

1. Multikulturalisme *isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain.
2. Multikulturalisme *akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. Multikulturalisme *otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya

berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.

4. Multikulturalisme *critical/interactive*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5. Multikulturalisme *kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.²⁵

Dalam konteks pembagian multikulturalisme Parekh ini, untuk menjembatani kelompok mayoritas dan minoritas, perlu diperhatikan tiga hal penting, yaitu multikulturalisme sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, preskripsi normatif, dan kebijakan pragmatis. *Pertama*, multikulturalisme sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, yaitu menggambarkan sudah terbangun pluralisme kultural, yakni setiap individu saling berinteraksi dan berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, multikulturalisme sebagai “preskripsi normatif” menunjukkan bagaimana seharusnya menyikapi dan mengorganisir keberagaman kelompok kultural dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan dapat berbentuk politik perbedaan, politik identitas atau politik pengakuan. Identitas kelompok yang

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Akasara Baru, 1990), 164-147.

²³ C.W. Watson, *Multiculturalism Concepts in the Social Studies* (Open University Press, 2000), 1.

²⁴ Suryadinata, *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta: LP3ES, 2004), ix.

²⁵ Azyumardi Azra, “Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia (2007). <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>.

berbeda-beda bukanlah sesuatu yang harus direduksi atau dihilangkan. Namun, keberagaman identitas kelompok yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang memang berbeda.

Ketiga, multikulturalisme sebagai “kebijakan pragmatis” menjadi bahan acuan untuk kebijakan pemerintah dalam menyikapi keberagaman kelompok masyarakat, seperti melaksanakan kegiatan untuk mengenal berbagai bahasa etnis yang ada, mengizinkan penggunaan atribut dan keagamaan, mensubsidi festival-festival berbagai etnis dan sebagainya.²⁶ Dengan melaksanakan ketiga aspek di atas, setiap individu dalam kultur apapun akan memperoleh keadilan, meskipun hidup dalam kultur yang beragam.

Sekolah dan Masyarakat yang Berbasis Multikultural

Sebagaimana definisi sekolah dan masyarakat di atas, maka sekolah dan masyarakat yang berbasis multikultural dapat diartikan sebagai suatu lembaga pendidikan formal dan lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi serta mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat serta mau menerima segala perbedaan dan keragaman yang ada. Menurut Komarudin, untuk dapat menghargai keragaman etnis, budaya, dan agama, di masyarakat dan sekolah setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan agar sikap bijak terkait pemahaman keragaman ini bisa tercapai.

Secara teologis-filosofis diperlukan kesadaran dan keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok etnis itu unik, sehingga tumbuh pula keyakinan bahwa dalam keunikannya masing-masing terdapat kebaikan universal yang terbungkus dalam wadah budaya, bahasa, dan agama yang beragam dan bersifat lokal. Sedangkan secara psikologis, manusia memerlukan pengondisian agar memunyai sikap inklusif dan positif terhadap orang lain atau kelompok yang berbeda.

Maka, desain kurikulum pendidikan dan kultur sekolah harus dirancang sedemikian rupa, sehingga anak didik mengalami secara langsung makna multikultural dengan panduan guru yang siap

dan matang. Tidak hanya di sekolah dilakukan upaya penyadaran multikultural, tetapi tokoh masyarakat beserta para pemerintah di mana sekolah itu berada, perlu menggalakkan program dan kegiatan bersama yang bernuansa multikultural.

Pada tahap awal, hendaknya diutamakan untuk mencari persamaan dan nilai-nilai universal dari keragaman budaya dan agama yang ada, sehingga aspek-aspek yang dianggap sensitif dan mudah menimbulkan konflik tidak menjadi isu yang dominan. Dengan berbagai cara kreatif dan inovatif, nilai-nilai luhur Pancasila dapat disegarkan kembali dan ditanamkan kepada masyarakat dan peserta didik dengan tujuan *sense of citizenship* dari sebuah negara-bangsa semakin kuat.²⁷

Apabila kebijakan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka akan diraih dua keuntungan sekaligus. *Pertama*, pendidikan multikultural yang intens diselenggarakan akan berubah menjadi kepemilikan multikulturalisme, yakni paham yang berkembang di masyarakat yang toleran terhadap keberagaman. *Kedua*, multikulturalisme yang mengakar akan berkembang menjadi ideologi di kalangan masyarakat yang memiliki keberagaman agama, bahasa, dan budaya yang teraplikasikan dalam perilaku hidup setiap hari.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikultural perlu ditumbuhkembangkan karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi, serta demografis sangat luar biasa. Baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Menurutnya, jalur pendidikan memunyai peran besar untuk mengatasi hal ini. Penanaman pemahaman multikultural sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, sehingga terus akan terkonstruksi dalam kognisi anak rasa kepemilikan dan kebanggaan akan budaya bangsa hingga masa dewasa.²⁸

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural tersebut, maka semua warga negara memiliki tanggungjawab yang sama, termasuk sekolah

²⁶ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, 167-169.

²⁷ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 70.

²⁸ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 71.

dan masyarakat. Jika sekolah berperan dalam mengajar nilai-nilai pendidikan multikultural dalam setiap jenjang pendidikan maka masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Karena secara konkret pendidikan kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar di antaranya:

- a. Kemampuan profesional untuk mengembangkan karier melalui kursus penyegaran, penataran, lokakarya, seminar, konferensi ilmiah, dan sebagainya;
- b. Kemampuan teknis akademik dalam suatu sistem pendidikan nasional, seperti sekolah terbuka, kursus tertulis, pendidikan melalui radio dan televisi, dan sebagainya;
- c. Kemampuan mengembangkan kehidupan beragama melalui pesantren, pengajian, pendidikan agama di surau atau langgar, biara, sekolah minggu, dan sebagainya;
- d. Kemampuan mengembangkan kehidupan sosial budaya melalui bengkel seni, teater, olahraga, seni beladiri, lembaga pendidikan spiritual, dan sebagainya;
- e. Keahlian dan keterampilan melalui sistem magang untuk menjadi ahli bangunan, dan sebagainya.²⁹

Melihat pentingnya peran masyarakat dalam keberhasilan pendidikan multikultural tersebut, maka sudah saatnya kita mengubah paradigma dalam memandang pendidikan dengan persekolahan (*schooling*). Artinya, pendidikan multikultural tidak diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan dengan program-program sekolah formal saja, melainkan dengan cara transmisi kebudayaan dan pengembangan potensi kebudayaan di tengah masyarakat. Dengan cara pandang seperti ini, semakin banyak pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural, yaitu kebersamaan antara masyarakat dan sekolah.³⁰

Menurut Bunnet sebagaimana ditulis

²⁹ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, 34-35.

³⁰ Muhaemin El-Ma'hady, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Kajian Awal," 4. Lihat di: <http://pendidikannetwork>. Lihat juga dalam Iis Arifudin, "Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah," *Jurnal Insania*, (2007): 4.

Azyumardi Azra, pendidikan multikultural itu memiliki tiga macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, program yang berorientasi pada materi (*content-oriented programs*) yang merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami, tujuan utamanya adalah memasukan materi tentang kelompok budaya yang berbeda dalam kurikulum dan materi pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan murid mengenai kelompok-kelompok tersebut.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, program pertama ini menambahkan aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar. Versi yang lebih canggih dari bentuk ini yaitu mengubah kurikulum secara aktif dengan tiga tujuan:

- a. Mengembangkan muatan multikultural melalui berbagai disiplin.
- b. Memasukkan sejenis sudut pandang dan perspektif yang berbeda dalam kurikulum.
- c. Mengubah aturan, yang pada akhirnya mengembangkan paradigma baru bagi kurikulum.

Kedua, program yang berorientasi siswa (*student-oriented programs*), yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok murid yang berbeda, meskipun ketika itu mereka tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. Beberapa program ini tidak dirancang untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, melainkan membantu siswa dengan budaya dan bahasa yang berbeda untuk menciptakan perubahan dalam mainstream pendidikan. Terdapat beberapa kategori program yang khas, yaitu:

- a. Program yang menggunakan riset dalam model belajar yang berbasis budaya (*culturally-based learning styles*) dalam menentukan gaya mengajar mana yang digunakan pada kelompok murid tertentu.
- b. Program dua bahasa (*bilingual*) atau dua budaya (*bicultural*).
- c. Program bahasa yang mengandalkan bahasa dan budaya sekelompok murid minoritas.

Ketiga, program yang berorientasi sosial

(*socially-oriented programs*) yang berupaya reformasi pendidikan maupun konteks politik dan budaya pendidikan, yang bertujuan bukan untuk meningkatkan prestasi akademik atau menambah sekumpulan pengetahuan multikultural, melainkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias.³¹

Dengan dilakukannya transformasi budaya di sekolah dan di masyarakat, budaya multikultural dan pemahaman *inklusif* terhadap segala bentuk perbedaan akan terwujud. Masyarakat yang penuh cinta kasih, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya akan menjadi corak kehidupan masyarakat multikultural.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka sekolah dan masyarakat yang berbasis multikultural merupakan lembaga pendidikan formal dan lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi serta mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat serta mau menerima segala bentuk perbedaan dan keragaman yang ada tanpa membeda-bedakan perbedaan yang melekat pada diri atau pun kelompok tertentu. Dengan adanya sekolah dan masyarakat yang berbasis multikultural tersebut, akan lahir generasi bangsa yang mau menghargai segala bentuk perbedaan, tanpa memerdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa atau pun agama, serta menerima bahwa pluralitas dan keragaman merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Marzuki. "Pemahaman Multikulturalisme untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Makalah*, Dialog Kebangsaan Universitas Negeri Surabaya 23 Desember 2010.

Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

³¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001), dalam Siti Mania, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan," *Lentera 78 Pendidikan*, (2010): 78-91.

Arifudin, Iis. "Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah." *Jurnal Insania*, (2007): 4.

Azra, Azyumardi. "Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia (2007)." <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>.

Banks, James A. *Multicultural Education: Historical Development, Dimention, and Practice*.

Budimansyah, Dasim dan Karim Suryadi. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Haris, Syamsuddin. *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, 2016.

Karim, Abdul Gafar. *Multikulturalisme*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2010.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta: Akasara Baru, 1990.

Lash, Scott dan Mike Feathersone (ed). *Recognition And Difference: Politics, Identity Multiculture*. London: Sage Publication, 2002.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Manan, Muhamad Abdul. "Gagasan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Bernuansa Mulikultural," *Edupeedia* (2017): 20-33.

Mania, Siti. "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan." *Lentera 78 Pendidikan*, (2010): 78-91.

El-Ma'hady, Muhaemin. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Kajian Awal," <http://pendidikannetwork>.

Naim, Ngainun dan Achmad Saiqi. *Pendidika Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- RI, Tim Kemenag. *Panduan integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Kirana Cakra Buana, 2012.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sinar Terang, 2009.
- Suardi. "Pendidikan Multikultural: Sebuah Dekonstruksi Pendidikan di Tengah Kemajemukan," *Wahana Didaktika* (2016): 19.
- Sukardjo, M dan Ukim Komarudin. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sulalah. *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
- Suryadinata. *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Watson, C.W. *Multiculturalism Concepts in the Social Studies*. Open University Press, 2000.